

**PERUBAHAN KEBIJAKAN KERJASAMA INDONESIA-TIONGKOK
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI (2014-2015)**

Oleh :
Okta Sari¹
email : Octha_sari@yahoo.com

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, M.A
Bibliografi: 5 Jurnal, 1 Buku, 21 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This thesis describes the policy changes that occurred in the two leadership, in three periods of the reign of president Republik Indonesia 6th and 7th Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) until Joko Widodo (2014-present). Where this cooperation include cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of China. In this case cooperation between the two countries that are in economic, political, trade, industry, tourism, culture etc.

Those changes that occur that can impact in inside and outside the country. In the reign of Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia and China is a partner of a close cooperation relationship, but China is not yet a trading partner key to Indonesia, while during the reign of Joko Widodo, the state China has become the country's most influential and Indonesia is now highly dependent on this bamboo curtain country, so that today China is a major trading partner for Indonesia.

Keywords: policy change, cooperation, Tiongkok.

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2012

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan salah satu studi kajian ilmu hubungan internasional yang akan menganalisa mengenai Perubahan Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia terhadap negara Tiongkok pada masa pemerintahan Jokowi. Tiongkok.

Negara Tiongkok terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah mencapai 9.556.779 km² pada tahun 2002.² Masalah penduduk merupakan persoalan penting yang menyentuh langsung pada kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa Tiongkok, keberhasilan atau kegagalan dari kemajuan bangsa Tiongkok serta pembangunan yang berkelanjutan antara penduduk di satu sisi, ekonomi dan masyarakat, sumber daya dan lingkungan.³

Hubungan kerjasama Indonesia-Tiongkok terjalin, sejak orde baru berkuasa tepatnya masa pemerintahan Soeharto, terbukti perjanjian kerjasama diplomatik pada tahun 1950. Hubungan yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dalam konstelasi perang dingin kala itu. Dahulunya sebutan negara Tiongkok adalah

‘Cina’ bagi negara Indonesia dan seluruh negara-negara dunia. Namun saat ini Indonesia menyebut negara tirai bambu tersebut adalah dengan sebutan Tiongkok⁴.

Pada permulaan Abad ke-19, masyarakat Tionghoa di Indonesia membangun organisasi-organisasi dan sekolah-sekolah sebagai upaya pengenalan terhadap tanah leluhur⁵. Sejak saat itu pula, tokoh-tokoh nasional Indonesia menggunakan istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” sejak ditanda tangannya dokumen resmi dari kedua belah pihak menggunakan “Republik Rakyat Tiongkok” digunakan dalam segala persuratan resmi di antara kedua negara.

Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau melakukan kebijakan tegas dan tertulis tentang istilah “Cina” menjadi “Tiongkok” itu di sahkan. Ditandai dengan penandatanganan Keputusan Presiden No. 12/2014 tentang pergantian istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2014.⁶ Istilah China tersebut, dinilai telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa, untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12

² <https://liputan6.com/2014/07/05/kebijakan-pemerintah-pada-era-susilo-bambang-yudhoyono-2004-2014-dalam-peningkatan-kualitas-hidup-untuk-mensejahterakan-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014.

³ Pazli, Purwasandi. 2013, “Strategi Cina menghadapi kepentingan Amerika Serikat terhadap China’s One Child Policy”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnsional”. Vol.5, No.1, hal.1008.

⁴

<http://www.antaranews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2015.

⁵

<http://www.antaranews.com/berita/425081/kepres-penggantian-istilah-china-menjadi-tionghoa-ditandatangani>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

⁶ Ibid

Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu. Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara *superpower* masa depan dalam perekonomian dunia ini sempat menjadi negara dengan perekonomian terbesar keenam di dunia dalam pertukaran uang asing. Tiongkok memainkan peran dalam pembaharuan internasional seperti konsumen, pesaing, penyalur dan menjadi inovator dan penyedia sumber daya manusia yang handal. Krisis moneter melanda Asia pada tahun 2000 tidak membuat Tiongkok menjadi negara yang terpuruk, justru pada saat itu nilai perdagangan Tiongkok meningkat mencapai 400 milyar dollar AS dan pada saat itu Tiongkok merupakan satu-satunya negara Asia yang hampir tidak terpengaruh krisis ekonomi yang melanda Asia sejak tahun 1997. Dalam hal ini Tiongkok menjadi negara yang paling diminati oleh negara-negara diseluruh dunia dalam hal kerjasama baik itu dalam hal ekonomi maupun politik.

Tiongkok sebagai salah satu anggota *world trade organization* (WTO), pasar Tiongkok semakin terbuka bagi perdagangan internasional dalam seluruh sektor. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Tiongkok membuat Indonesia menjalin mitra dagang dengan negara RRT tersebut. Kerjasama dengan Tiongkok ini terjadi disebabkan pada masa itu pemerintah Indonesia sedang mengalami kontroversi

dengan negara tetangga Malaysia.⁷ Tiongkok dan Indonesia dikenal kaya akan sumber daya, namun dalam hal teknologi dan biaya tenaga kerja, Indonesia masih jauh tertinggal⁸. Tiongkok memperluas pasar produk-produk mereka ke negara-negara lain termasuk Indonesia, dan produk yang banyak dijual oleh negara Tiongkok sampai saat ini masih sangat laris di pasar dagang Indonesia.

Berbagai produk Tiongkok yang di ekspor ke Indonesia mendapat respon baik oleh pelaku pasar lokal karena harganya lebih murah dibandingkan dengan produk asal Indonesia itu sendiri walaupun sebenarnya hal itu semakin melemahnya daya tarik produk lokal dan tingginya daya saing antara produk import dan produk dalam negeri. Tiongkok memfokuskan diri terhadap pasar Asia khususnya Indonesia, karena ekonominya yang terus tumbuh selain itu presiden Xi Jinping, presiden yang saat ini menjabat di Tiongkok itu juga mengusungkan agar ASEAN berada pada level zona perdagangan bebas. Indonesia dinilai sebagai pasar yang potensial bagi produk Tiongkok selain jumlah penduduknya yang sangat besar juga ekonominya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.⁹

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara RRT menunjukkan perluasan dan pendalaman di bidang kerja sama. Kemitraan ini yang

⁷ Siti Aminah, 2012. “*Motivasi China Menguasai Pasar Industri Manufaktur di Indonesia*”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnasional”. Vol.4, No.1, hal. 667.

⁸ Dewi Marisa, 2013. “Hubungan perdagangan Indonesia-Cina, Studi kasus: Produk mainan anak Cina di Indonesia (2008-2010)”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnasional”. Vol.4, No.2, hal. 848.

⁹ *Ibid*

merupakan suatu pendekatan yang mensinergikan potensi yang dimiliki oleh negara-negara yang termaksud dengan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan setara. Dalam kaitan ini, maka kemitraan strategis Indonesia mencakup negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai salah satu mitranya.¹⁰

Terlaksana atau tidaknya sebuah kerjasama antar negara tidak terlepas dari pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan suatu negara. Presiden Indonesia tepatnya Soeharto, SBY, sampai pada masa pemerintahan Jokowi. Namun disini penulis memfokuskan perubahan kebijakan pada era SBY samapi era Jokowi sekarang ini. Penyelenggaraan pemerintah harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat.¹¹

Sejak masa kepemimpinan SBY, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif. Yang akan membedakan adalah kebijakan luar negeri dari masing-masing pemimpin. Dijajah selama berabad-abad membuat bangsa Indonesia menolak segala upaya yang hendak mengkolonialisasi mereka lagi, entah itu dari dominasi ekonomi maupun ideologi (Hatta, 1953).¹²

¹⁰<http://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/Books/DIPLOMASI%202011.pdf>. Diakses pada tanggal 26 September 2015.

¹¹ Faisyal Rani, 2012. "Strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan menurut perspektif sosial pembangunan". *Jurnal Hubungan Internasional "Transnasional"*. Vol.4, No.1, hal. 748.

¹² <http://www.fkpmaritim.org/politik-luar-negeri-indonesia-2014-2019-3/>. Diakses pada tanggal 26 September 2015.

Selama masa pemerintahan SBY (2004-2009) merupakan saat yang cukup bagus untuk melanjutkan kembali sebuah kerjasama internasional. Dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia saat ini, penting untuk memperluas mitra strategis di seluruh dunia.¹³ Dan pada masa SBY ini juga membuat perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Strategi pembangunan ekonomi SBY benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun.¹⁴

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tepatnya pada tanggal 3 Mei 2014, Presiden menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masuk 10 besar di dunia. Presiden memaparkan sembilan negara yang berada di peringkat teratas yakni Amerika Serikat. Selanjutnya, diikuti oleh negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil,

¹³ Rindu Faradisah Novana, 2012 .

"Kerjasama Indonesia dengan Rusia dalam bidang pertahanan militer pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono". *Jurnal Hubungan Internasional "Transnasional"*. Vol.3, No.2, hal 647.

¹⁴<http://modul.mercubuana.ac.id/modul/Fakultas%20Ekonomi%20Dan%20Bisnis/Manajemen/Sitti%20Rakhman%20%20Perekonomian%20Indonesia%20%5B84041%5D/Modul%20Perekonomian%20Indonesia%20%5BTM1%5D.docx>. Diakses pada tanggal 28 September 2015.

Prancis, dan Inggris. Sedangkan pada tahun 2013 lalu, posisi Indonesia berada di peringkat ke-16.¹⁵

Bukan hanya pujian kritikan juga dituai oleh SBY seperti adanya kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Namun alasan dari kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.

Pada pertemuan antar presiden Tiongkok Xi Jinping dengan SBY pada tahun 2013 lalu negara Tiongkok mengusungkan agar ASEAN berada pada level zona perdagangan bebas. Tiongkok kian serius dalam menjalin kerjasama dengan anggota-anggota asean terutama dibidang perdagangan dan investasi. Kedua negara setuju mningkatkan koordinasi mendorong kemitraan tiongkok dan negara-negara anggota asean termasuk Indonesia. Presiden Tiongkok mengajak indonesia bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi dikawasan asean. Untuk itu tiongkok mengusulkan membangun bank investasi, infrastruktur asia untuk menyediakan dana pembangunan kepada negara-negara berkembang. Bank investasi infrastruktur asia itu akan bekerjasama dengan bank pembangunan bilateral yang ada guna mendorong ekonomi asean secara berkelanjutan. Selain itu Tiongkok-Indonesia sepakat untuk membangun kerjasama dalam kemitraan strategis dalam 10 tahun kedepan. Baik kerjasama ekonomi maupun pembangunan, maritim dan

perikanan maupun hubungan antar masyarakat.¹⁶

Disaat yang bersamaan presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jin Ping juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden SBY khususnya membahas mengenai peningkatkan level kerjasama kedua negara yang awalnya bersifat *strategic partnership* menjadi *comprehensive strategic partnership*. Bidang kerjasama meliputi perdagangan, investasi hingga bidang sosial kesejahteraan. rencana kerjasama Jakarta dengan Beijing tidak bisa difokuskan pada perdagangan karena belakangan ini kerjasama perdagangan kedua negara mengalami defisit. Namun hal tersebut menurutnya tetap akan menjadi perhatian yang mana Tiongkok akan melakukan kompensasi dengan peningkatan investasi di Indonesia bahkan negara-negara ASEAN.¹⁷

Pertemuan antara SBY dengan wakil presiden Jusuf Kala yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2014 lalu itu membahas tentang harapan presiden SBY terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melanjutkan program yang dulu dibuat oleh pemerintahannya. Harapan itu disampaikan SBY kepada wakil presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan di Kantor Wakil Presiden. Di samping mengingatkan perlunya kesinambungan program pemerintah, SBY mengaku telah menyampaikan dukungannya agar pemerintahan

16

<https://www.youtube.com/watch?v=tJAa3MzMBO8>. "metro-tv-siang". Diakses tanggal 27 september 2015.

17 <http://www.beritasatu.com/asia/141640-xi-jin-ping-datangi-sby-untuk-tingkatkan-level-kemitraan.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

¹⁵<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/03/2149333/SBY.Indonesia.Masuk.10.Besar.Ekonomi.Dunia>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015.

Jokowi-Kalla bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.¹⁸ SBY juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya dengan baik kepada masyarakat luas.¹⁹

Baru-baru ini perekonomian Indonesia mulai menunjukkan kemerosotan di tandai dengan melemahnya rupiah pemerintah yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2015. Meluncurkan paket kebijakan ekonomi ketiga menyusul paket kebijakan ekonomi pertama dan kedua yang dirasa masih belum berdampak efektif terhadap perbaikan kondisi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah hingga kisaran 14.800 per dollar Amerika.²⁰

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesungguhnya melanjutkan kebijakan SBY. Namun ada sedikit penekanan yang dilakukan Jokowi, yaitu kebijakan maritim yang ditargetkan berjalan untuk 5 tahun kedepan. dengan target di bidang kemaritiman, peran ASEAN dalam menjalin hubungan kerja sama sangat penting. Sebab sebagian besar laut di Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Dalam pandangan Jokowi ketika ada debat kandidat Capres dan

¹⁸<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/08/15184111/Kepada.JK.SBY.Minta.Program.Pemerintahannya>. Diakses pada tanggal 22 September 2015.

¹⁹<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150513215241-32-53196/sby-minta-jokowi-komunikasikan-kebijakan-dengan-baik/>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

²⁰http://rri.co.id/post/editorial/360/editorial/kpercayaan_pasar_terhadap_kebijakan_paket_ekonomi_iii_memperbaiki_kondisi_perekonomian_indonesia.html

Cawapres pada tahun 2014 lalu, Indonesia tidak perlu terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan jika manfaat yang didapat dari keikutsertaan tersebut tidak ada. Pada dasarnya sebagai negara terbesar di ASEAN dan paling netral menanggapi kasus ini, peran Indonesia menjadi dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan Jokowi menjadi sangat mengejutkan karena ASEAN sendiri telah mengupayakan *Declaration of Conduct (DoC)* dan kemudian *Code of Conduct (CoC)* untuk menekan tensi konflik di laut Tiongkok selatan.²¹

Selain itu Jokowi juga meminta Tiongkok berinvestasi dalam pembangunan rekonstruksi rel kereta api berkecepatan tinggi, energi, maritim, pariwisata, dan pengembangan pembangunan industri pelabuhan. Namun yang menjadi pusat perhatian pada saat ini adalah mengenai kebijakan Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur dalam kendaraan masal adalah kereta api berkecepatan tinggi yang lagi-lagi kali Jokowi sangat berharap bisa bekerjasama oleh Tiongkok dalam pembuatannya.

Kereta cepat itu awalnya diniatkan untuk menjadi fase pertama rangkaian rel sepanjang 763 kilometer menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Pihak Istana Kepresidenan mengatakan masih ingin membangun kereta api kecepatan tinggi yang menjangkau seluruh Pulau Jawa. Jokowi menjelaskan, pemerintah memberikan alternatif kereta dengan kecepatan 350 kilometer (km) per jam atau 250 km per jam. Dia juga

²¹ <http://www.fkpmaritim.org/politik-luar-negeri-indonesia-2014-2019-3/>. Diakses pada tanggal 26 September 2015.

mempertimbangkan hitung-hitungan secara politik dan hitungan ekonomi dalam jangka panjang.

Proyek yang nyaris di batalkan itu tetap dipertahankan oleh presiden Jokowi agar kerjasamanya Indonesia dengan Tiongkok tidak terancam. Presiden Joko Widodo membantah membatalkan proyek kereta cepat itu. Ia setuju dengan proyek ini asal memenuhi tiga syarat, yaitu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tidak memerlukan jaminan pemerintah, dan bersifat *business to business* (B to B).²²

Indonesia punya peran yang sangat besar dalam komunitas ASEAN sehingga ketika negara ASEAN mengetahui kebijakan luar negeri Jokowi tentang visi kemaritimannya, akan ada saling pengertian dan dukungan kepada kebijakan luar negeri Jokowi. Tiongkok dan Indonesia kembali membuat perjanjian kerjasama diidang infrastruktur dan investasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menjelaskan atau memaparkan permasalahan yang konkrit maka penulis menggunakan perspektif behavioralis yang menekankan pada seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan.

Behaviorisme tidak memperlakukan manusia baik atau jelek, rasional atau emosional; behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya

di kendalian oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia.²³ Dari teori behavioralis ini dapat dilihat secara seksama bahwa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh presiden Jokowi adalah hasil dari sebuah pemikiran yang belajar dari kebijakan di masa lampau guna untuk menghasilkan kebijakan pembaharu dan di harapkan lebih baik kedepannya.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan tingkat analisa dalam perubahan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Jokowi terhadap kebijakan sebelumnya yakni kebijakan SBY dalam menjalin kerjasama dengan Tiongkok adalah perilaku Individu (*individual level analysis*). Alasan penulis menentukan level analisis perilaku individu adalah karena aktor negara yaitu presiden Jokowi melakukan suatu keputusan-keputusan yang mempengaruhi perubahan kebijakan itu sendiri.

Dalam suatu proses politik internasional yang melibatkan hubungan antar aktor negara dan non-negara didalamnya, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi dari kepentingan masing-masing aktor yang kemudian saling bertemu. Dalam hubungan internasional khususnya hubungan antar negara hal ini disebut Politik Luar Negeri. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri. Menurut Perwita dan Yani, Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah 'action

²²

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/15/169722/jokowi-siapa-bilang-kereta-cepat-dibatalkan>. Diakses pada tanggal 27 September 2015.

²³ <http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

theory', atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) secara umum merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan.

Ekspansi Tiongkok

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, *Tiongkok Construction Bank Corporation* (CCB) tertarik melakukan ekspansi ke Indonesia. Hal ini terkait rencana Pemerintah Indonesia dengan serius melakukan pembangunan infrastruktur. Pada tanggal 17 Desember 2015 Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I OJK Mulya E Siregar mengatakan, CCB yang merupakan bank terbesar kedua di Tiongkok ini bisa mengakuisisi bank lokal untuk melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia.²⁴

Achmad Sigit Dwiwahjono, Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin, mengatakan empat perusahaan ini meminati empat sektor industri yakni kabel bawah laut, keramik, baja, farmasi dan permesinan. Kementerian Perindustrian menyatakan empat perusahaan asal Tiongkok yakni *Xingxing Group*,

²⁴<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/17/135302426/Bank.Raksasa.Asal.Tiongkok.Akan.Ekspansi.ke.Indonesia>. Diakses pada tanggal 4 desember 2015.

Qingdao Hanhe Cable, Hebei ChengYe Machinery Manufacturing, Guangdong Donpeng Holding Company Limited, berinvestasi di Indonesia.²⁵ Dengan dimulainya Produsen alat berat asal Tiongkok ini sejak beberapa tahun terakhir agresif menggarap pasar Indonesia. Tahun 2015 ini perusahaan ini resmi membuka perwakilannya di Indonesia dengan mendirikan anak usaha PT Sunward Machinery Indonesia di kawasan Latumeten, Jakarta Barat pada tanggal 4 Desember 2015.

Pada tanggal 6 Juni 2015 lalu tepatnya di Jakarta. Telah melakukan pertemuan dengan Kemenperin, mereka akan melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kebutuhan alat berat untuk mendukung realisasi proyek proyek infrastruktur di Indonesia membuka celah peluang pasar yang sangat terbuka bagi pelaku industri alat berat dari luar negeri. Sunward misalnya. Produsen alat berat asal Tiongkok ini sejak beberapa tahun terakhir agresif menggarap pasar Indonesia. Tahun ini perusahaan ini resmi membuka perwakilannya di Indonesia dengan mendirikan anak usaha PT Sunward Machinery Indonesia di kawasan Latum eten, Jakarta Barat.²⁶

Di Indonesia, brand ini memasarkan beragam jenis alat berat untuk mendukung pengerjaan proyek

²⁵

<http://industri.bisnis.com/read/20150605/257/440495/kemenperin-4-emiten-tiongkok-ini-siap-ekspansi-ke-indonesia>

²⁶

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/09/12/produsen-alat-berat-tiongkok-ekspansi-ke-pasar-indonesia>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2015.

infrastruktur sampai untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tambang dan perkebunan. *Line up* produknya mencakup mesin pile-driving besar, ekskavator, perlengkapan drilling, kendaraan industrial, mesin hoisting, dan lain-lain. Sunward Machinery Indonesia memperkirakan, untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, kebutuhan alat berat tahun ini akan mencapai 24.000 unit. Angka tersebut melonjak tajam dari kebutuhan pasokan alat berat pada 2012 lalu yang mencapai sekitar 16.000 unit.

Sunward pertama kali masuk ke pasar Indonesia pada 2005, dengan memasarkan produk alat berat *static pile drivers*. Produk ini mendapat sambutan pasar positif dengan dukungan layanan purna jual. Di Tiongkok sendiri, Sunward berdiri tahun 1999 dan telah memasarkan ragam produk alat beratnya ke lebih dari 30 negara di Eropa, Amerika, Amerika Selatan, Afrika, Asia dan Oceania dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet (CIS) seperti Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Republik Belarus dan Turkmenistan. Khusus pasar Indonesia, di tahun pertama pembukaan kantor operasionalnya Sunward Machinery menargetkan nilai penjualan 1 juta dolar AS dan meningkat menjadi 3,5 juta dolar AS di tahun kedua.²⁷

Keterlibatan Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS)

Secara Geografi Laut Tiongkok Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRT dan Taiwan,

²⁷ *ibid*

Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). Luas perairan Laut Tiongkok Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. kawasan LTS merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting, kondisi geografis posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan (SLOT) dan jalur komunikasi internasional (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah merubah jalur laut Tiongkok selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Tiongkok Selatan setiap tahun.²⁸

Konflik klaim wilayah teritori di LTS melibatkan 6 negara, 4 negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipna, Vietnam, Brunei) dan 2 negara lainnya yaitu Tiongkok dan Taiwan.

Keterlibatan negara Indonesia dalam manajemen konflik di LTS, adalah sesuatu yang didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, usaha untuk menemukan dan mencegah timbulnya penyebab konflik, keyakinan akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan yang dirasa

²⁸

<http://international.sindone.com/read/1007432/40/kisruh-laut-china-selatan-bisa-picu-perang-dunia-habis-habisan-1433124478>.

Diakses pada tanggal 04 Desember 2015.

tepat mengenai mekanisme penyelesaian konflik.²⁹

Kalau dilihat dari segi manfaat, pencapaian sebuah resolusi konflik bagi persoalan LTS tidak saja bermanfaat secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Besarnya potensi ekonomi seperti: jalur pelayaran, kandungan alam seperti minyak, gas dan mineral serta kekayaan ikannya kalau bisa dimanfaatkan dan dikelola akan sangat bermanfaat bagi setiap negara yang terlibat. Maka dari itu apabila menarik sebuah hipotesa, penyelesaian konflik akan memiliki manfaat yang sangat signifikan tidak saja bagi masyarakat LTS itu sendiri tetapi juga bagi Indonesia dan dunia internasional.³⁰

Selain Indonesia sebagai *front leader*, kapasitas lain yang tersedia bagi penyelesaian konflik adalah ASEAN, dan terbentuknya *Asian Regional Forum (ARF)*. 22 negara terlibat dalam keamanan kawasan Asia Pasifik, termasuk seluruh anggota ASEAN) sudah melaksanakan diskusi tentang LTS. Tiongkok sebagai anggota dari ARF mengajukan bahwa dulu pertikaian teritorial harus diselesaikan melalui jalur bilateral.³¹ Kandungan kekayaan Alam yang ada di kawasan LTS telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara

Tiongkok dan sebagian negara-negara anggota ASEAN yang berada wilayah LTS. Menurut data Kementrian Geologi dan Sumber Daya Mineral Daya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkirakan bahwa wilayah Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton (1.60×10^{10} kg), lebih besar di banding Kuwait negara yang menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan minyak terbesar dunia saat ini dengan jumlah 13 miliar ton ($1,17 \times 10^{10}$ kg).³²

Sementara kandungan gas alam di LTS mungkin merupakan sumber hidrokarbon yang paling melimpah. Sebagian besar hidrokarbon kawasan LTS dieksplorasi oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perkiraan menurut *United States Geological Survey* dan sumber lain-lain menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% dari hidrokarbon di LTS adalah gas sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik (Tcf) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya. Potensi kandungan cadangan minyak dan gas di LTS ini juga telah memicu semakin intensifnya situasi klaim teritorial dari negara-negara yang terlibat.³³

Untuk masalah Laut Tiongkok Selatan, Indonesia bersedia berperan sebagai *honest broker*

²⁹Alan C. Tidwell, 1998, *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York, Continuum, hal.3-8.

³⁰ www.e-jurnal.com/2015/09/konflik-laut-cina-selatan-dan-politik.html. Diakses pada tanggal 08 November 2015.

³¹ pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/.../politik_luar_negeri_Indonesia.pdf. diakses pada tanggal 04 Desember 2015.

³² Ibid
³³

<http://jejaktamboen.blogspot.co.id/2014/07/1atar-belakang-konflik-laut-cina-selatan-dan-dampaknya.html>. Diakses pada Tanggal 30 November 2015.

dengan berpegang pada DoC dan CoC yang digagas ASEAN. *Declaration of Conduat atau DoC dan Code of Conduct atau CoC* adalah tata berperilaku yang ditetapkan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung di ASEAN untuk mengatasi sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan lima negara. Hal ini dibahas pada forum pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vietnam Truong Tang Sang di sela-sela Konferensi Asia Afrika pada tanggal 23 April lalu.³⁴

Dari pandangan realisme neoklasik, politik luar negeri dipengaruhi oleh politik domestik atau dalam negeri, lalu kemudian, politik domestik dipengaruhi oleh sistem internasional. Ada beberapa persaingan birokratik yang cukup besar diantara aktor-aktornya, yaitu Kementerian Luar Negeri, Tentara Pembebasan Rakyat, dan unsur-unsur dalam Tentara Pembebasan Rakyat diantaranya Departemen Staf Umum, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Apabila diperhatikan terdapat peran yang cukup besar pada Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Laut dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam Konflik LTS.

Kemampuan mereka dalam mempengaruhi kebijakan didukung oleh *power* dan prosedur birokrasi yang cenderung menguntungkan kedua instansi tersebut. Selain itu, perubahan-perubahan yang terjadi terjadi beberapa tahun sebelumnya dalam lingkup politik domestik

³⁴

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150423160205-106-48797/ri-siap-tengah-konflik-laut-vietnam-tiongkok/>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

Tiongkok, yang disebabkan oleh proses pengantian dan adaptasi yang dilakukan oleh Tiongkok dari waktu ke waktu, yaitu meningkatnya peran militer dalam proses politik.³⁵ Posisi Indonesia persis berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan di barat laut-utara Kepulauan Natuna, Bangka Belitung. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN punya peran penting di kawasan. Pada sisi lain, dengan politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia tidak pernah menyatakan pihak luar yang berpotensi menjadi ancaman kepentingan nasional. TNI sebagai kekuatan militer Indonesia, juga mempunyai peranan penting dalam membangun kestabilan dan keamanan regional guna memelihara keseimbangan di antara negara-negara berkepentingan yang dikendalikan kekuatan luar ASEAN. Secara ideal, jika Indonesia menjadi pusat gravitas maritim regional maka Indonesia harus pula memiliki pelabuhan internasional terbesar.³⁶

Langkah ini merupakan cara yang paling tepat saat ini untuk sengketa di LTS, karena semangat kerja sama dan prinsip ASEAN untuk sengketa LTS ialah tidak menjadikan aksi saling mengklaim itu sebagai ajang rivalitas dan saling menghantam antar beberapa kekuatan, namun harus dicarikan solusi damai yang mengikat bagi semua pihak.

³⁵ <http://www.ilmu-hi.com/analisis-politik-luar-negeri-china-dalam-kasus-laut-china-selatan/#>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

³⁶

<http://www.antaranews.com/berita/522045/indonesia-harus-waspadai-potensi-konflik-laut-china-selatan>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

Simpulan

Dalam konteks diplomasi, pemerintah yang baru juga harus memperhatikan kualitas dan kapabilitas diplomatnya di luar negeri. Banyak yang berpandangan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kedepan tidak akan begitu berbeda dengan periode lalu. Pendapat tersebut sangat tepat jika ditujukan kepada kubu Prabowo/Hatta karena mereka telah menekankan untuk melanjutkan *million friends zero enemy* milik Presiden SBY. *Million friends zero enemy* merupakan semboyan yang hendak menampilkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru, mendorong perlunya sikap kerjasama tanpa menunjukkan keberpihakan. Juga sekaligus menandakan bahwa Indonesia secara aktif ikut serta dalam arena politik internasional. Namun pada prakteknya, semboyan ini tidak selalu sesuai untuk diimplementasikan pada situasi tertentu.

Hubungan yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pola interaksi saling menguntungkan ini terus berulang dalam evolusi hubungan bilateral keduanya. Dari pembahasan ini, dimana penulis melihat dari kebijakan yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, mitra kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan. Pada saat era SBY, Tiongkok bukan merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia, dan bermula pada pertengahan tahun

2014 hingga sekarang dimana pada masa pemerintahan Jokowi, Tiongkok merupakan negara yang menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia dan menjadi negara paling berpengaruh bagi Indonesia.

Ketergantungan perekonomian yang dialami Indonesia terhadap Tiongkok ini membuat Indonesia. Di tengah lemahnya perekonomian Tiongkok, Indonesia masih melihat negara tersebut sebagai pasar ekspor besar yang menguntungkan. Hal tersebut terbukti dari Indonesia yang masih terus mempromosikan barang ekspornya di pasar Tiongkok untuk meningkatkan ekspor dan mendukung perekonomiannya, dalam pameran Tiongkok-ASEAN Expo 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dewi Marisa, 2013. “ Hubungan perdagangan Indonesia-Cina, Studi kasus: Produk mainan anak cina di Indonesia (2008-2010). Jurnal Hubungan Internasional “Transnasional”. Vol.4, No.2, hal. 848.
- Faisyal Rani, 2012. “Strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan menurut perspektif sosial pembangunan”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnasional”. Vol.4, No.1, hal. 748.
- Pazli, Purwasandi. 2013, “Strategi Cina menghadapi kepentingan Amerika Serikat terhadap China’s One Child Policy”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnsional”. Vol.5, No.1, hal.1008.
- Rindu Faradisah Novana, 2012 . “Kerjasama Indonesia dengan Rusia dalam bidang

pertahanan militer pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnasional”. Vol.3, No.2, hal 647.

Siti Aminah, 2012. “*Motivasi China Menguasai Pasar Industri Manufaktur di Indonesia*”. Jurnal Hubungan Internasional “Transnasional”. Vol.4, No.1, hal. 667.

Buku

Alan C. Tidwell, 1998, *Conflict Resolved? : A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York, Continuum, hal.3-8.

Website

<http://belajarpikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/03/2149333/SBY.Indonesia.Masuk.10.Besar.Ekonomi.Dunia>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/17/135302426/Bank.Raksasa.Asal.Tiongkok.Akan.Ekspansi.ke.Indonesia>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2015.

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/15/169722/jokowi-siapa-bilang-kereta-cepat-dibatalkan>. Diakses pada tanggal 27 September 2015.

<http://industri.bisnis.com/read/20150605/257/440495/kemenperin-4-emitentiongkok-ini-siap-ekspansi-ke-indonesia>

<http://international.sindonews.com/read/1007432/40/kisruh-laut-china-selatan-bisa-picu-perang-dunia-habis-habisan-1433124478>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2015.

<http://jejaktamboen.blogspot.co.id/2014/07/1atar-belakang-konflik-laut-cina-selatan-dan-dampaknya.html>.

Diakses pada Tanggal 30 November 2015.

<http://modul.mercubuana.ac.id/modul/Fakultas%20Ekonomi%20Dan%20Bisnis/Manajemen/Sitti%20Rakhman%20%20Perekonomian%20Indonesia%20%5B84041%5D/Modul%20Perekonomian%20Indonesia%20%5BTM1%5D.docx>. Diakses pada tanggal 28 September 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/08/15184111/Kepada.JK.SBY.Minta.Program.Pemerintahannya>. Diakses pada tanggal 22 September 2015.

http://rri.co.id/post/editorial/360/editorial/kepercayaan_pasar_terhadap_kebijakan_paket_ekonomi_iii_memperbaiki_kondisi_perekonomian_indonesia.html

<http://www.antaraneews.com/berita/425081/keppres-penggantian-istilah-china-menjadi-tionghoa-ditandatangani>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/522045/indonesia-harus-waspadai-potensi-konflik-laut-china-selatan>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

<http://www.beritasatu.com/asia/141640-xi-jin-ping-datangi-sby-untuk-tingkatkan-level-kemitraan.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150423160205-106-48797/ri-siap-tengah-konflik-laut-vietnam-tiongkok/>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150513215241-32-53196/sby-minta-jokowi-komunikasikan-kebijakan-dengan-baik/>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

<http://www.fkpmaritim.org/politik-luar-negeri-indonesia-2014-2019-3/>.
Diakses pada tanggal 26 September 2015.

<http://www.fkpmaritim.org/politik-luar-negeri-indonesia-2014-2019-3/>.
Diakses pada tanggal 26 September 2015.

<http://www.ilmu-hi.com/analisis-politik-luar-negeri-china-dalam-kasus-laut-china-selatan/#>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

<http://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/Books/DIPLOMASI%202011.pdf>.
Diakses pada tanggal 26 September 2015.

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/09/12/produsen-alat-berat-tiongkok-ekspansi-ke-pasar-indonesia>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2015.

<https://liputan6.com/2014/07/05/kebijakan-pemerintah-pada-era-susilo-bambang-yudhoyono-2004-2014-dalam-peningkatan-kualitas-hidup-untuk-mensejahterakan-masyarakat/>.
Diakses pada tanggal 24 Desember 2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=tJAa3MzMBO8>. “metro-tv-siang”. Diakses tanggal 27 september 2015.

www.e-jurnal.com/2015/09/konflik-laut-cina-selatan-dan-politik.html.
Diakses pada tanggal 08 November 2015.